

KPU KOTA SAWAHLUNTO

(656223)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Laporan Keuangan

Untuk Periode Tahun 2015

JALAN KHATIB SULAIMAN NO. 54 SAWAHLUNTO

E-MAIL : kpusawahlunto@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto adalah salah satu entitas akuntansi dibawah di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sawahlunto, 31 Desember 2015

Sekretaris,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Maizon, SH
NIP 19590101 198403 1011

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iv
Indeks Catatan Atas Laporan Keuangan	v
Daftar Singkatan	vii
Pernyataan Tanggung Jawab	viii
Ringkasan Laporan Keuangan.....	1
Laporan Realisasi Anggaran	3
Neraca	4
Laporan Operasional (LO).....	5
Laporan Perubahan Ekuitas.....	6
CALK Pendahuluan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Dasar Hukum	7
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis	7
A.3. Basis Akuntansi.....	8
A.4. Dasar Pengukuran....	8
A.5. Kebijakan Akuntansi	9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
B.1. Pendapatan.....	17
B.2. Belanja Negara	17
B.3 Belanja Pegawai	19
B.4 Belanja Barang	19
B.5 Belanja Modal Tanah	20
B.6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20
B.7 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21
B.8 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	21
B.9 Belanja Bantuan Sosial	21
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	22
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	22
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan.....	22
C.3. Persediaan.....	22
C.4. Tanah	23
C.5. Peralatan dan Mesin	23
C.6. Gedung dan Bangunan	24
C.7. Jalan dan Irigasi.....	25
C.8. Aset Tetap Lainnya.....	25
C.9. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).....	26
C.10. Akumulasi Aset Tetap	26
C.11. Aset Tak Berwujud	27
C.12. Aset Lain-lain	27
C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	28
C.14 Uang Muka dari KPPN	28
C.15 Pendapatan yang ditangguhkan	28
C.16 Pendapatan Diterima Dimuka	28
C.17 Utang kepada Pihak Ketiga	29
C.18 Dana yang harus disediakan untuk Kewajiban jangka pendek	29

C.19 Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	29
C.20 Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	30
C.21 Ekuitas	30
D. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional	31
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	31
D.2 Beban Pegawai	31
D.3 Beban Persediaan	31
D.4 Beban Jasa	32
D.5 Beban Pemeliharaan	32
D.6 Beban Perjalanan Dinas	33
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	33
D.8 Beban Bantuan Sosial	34
D.9 Kegiatan Non Operasional	34
D.10 Pos Luar Biasa	34
E. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional	35
E.1 Ekuitas Awal	35
E.2 Surplus (Defisit) LO	35
E.3 Koreksi Nilai Persediaan	35
E.4 Koreksi Aset Tetap	35
E.5 Koreksi Atas Beban	35
E.6 Koreksi Atas Pendapatan	36
E.7 Ekuitas Akhir	36
F. Pengungkapan Penting Lainnya	36
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	36
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	36
F.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	36
F.4. Rekening Pemerintah	37
F.5. Penyusutan Aset.....	37
F.6. Pengungkapan Lain-lain	37
Lampiran	38
Lampiran A.1	38
Lampiran A.2	39
Laporan-laporanPendukung	42
CALK BMN	
Laporan SAIBA Tahun 2015	
BAR SAIBA KPPN Tahun 2015	
Neraca SIMAK BMN Tahun 2015	
Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2015	
Laporan Penyusutan BMN Barang Kuasa Pengguna Tahun 2015	
Laporan Persediaan Tahun 2015	
Berita Acara Rekonsiliasi BMN Tahun 2015	
Rekening Koran Tahun 2015	
SK Sekretaris KPU Kota Sawahlunto tentang Pengelola Anggaran Tahun 2015	

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran A1 : Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap	38
Lampiran A2 : Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Per 31Desember 2015	39

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	Hal
Catatan A. Penjelasan Hukum	7
Catatan A.1. Dasar Hukum	7
Catatan A.2. Profil dan Kebijakan Teknis	7
Catatan A.3. Basis Akuntansi	8
Catatan A.4. Dasar Pengukuran	8
Catatan A.5. Kebijakan Akuntansi	9
Catatan B. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	16
Catatan B.1. Pendapatan	17
Catatan B.2. Belanja Negara	17
Catatan B.3. Belanja Pegawai	19
Catatan B.4. Belanja Barang	19
Catatan B.5. Belanja Modal Modal Tanah	20
Catatan B.6. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20
Catatan B.7. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21
Catatan B.8. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	21
Catatan B.9. Belanja Bantuan Sosial	21
Catatan C. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca	21
Catatan C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	22
Catatan C.2. Kas di Bendahara Penerimaan	22
Catatan C.3. Persediaan	22
Catatan C.4. Tanah	23
Catatan C.5. Peralatan dan Mesin	23
Catatan C.6. Gedung dan Bangunan	24
Catatan C.7. Jalan dan Irigasi	25
Catatan C.8. Aset Tetap Lainnya	25
Catatan C.9. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	26
Catatan C.10. Akumulasi Aset Tetap	26
Catatan C.11. Aset Tak Berwujud	27
Catatan C.12. Aset Lain-lain	27
Catatan C.13. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	28
Catatan C.14. Uang Muka dari KPPN	28
Catatan C.15. Pendapatan yang ditangguhkan	28
Catatan C.16. Pendapatan Diterima Dimuka	28
Catatan C.17. Utang kepada Pihak Ketiga	29
Catatan C.18. Dana yang harus disediakan untuk Kewajiban jangka pendek	29
Catatan C.19. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	29
Catatan C.20. Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	30
Catatan C.21. Ekuitas	30
Catatan D. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional	31
Catatan D.1. PendapatanPenerimaan Negara BukanPajak	31

Catatan D.2	Beban Pegawai	31
Catatan D.3	Beban Persediaan	31
Catatan D.4	Beban Jasa	32
Catatan D.5	Beban Pemeliharaan	32
Catatan D.6	Beban Perjalanan Dinas	33
Catatan D.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	33
Catatan D.8	Beban Bantuan Sosial	34
Catatan D.9	Kegiatan Non Operasional	34
Catatan D.10	Pos Luar Biasa	34
Catatan E.	Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional	35
Catatan E.1	Aset Tak Berwujud	35
Catatan E.2	Surplus (Defisit) LO	35
Catatan E.3	Koreksi Nilai Persediaan	35
Catatan E.4	Koreksi Aset Tetap	35
Catatan E.5	Koreksi Atas Beban	35
Catatan E.6	Koreksi Atas Pendapatan	36
Catatan E.7	Ekuitas Akhir	36
Catatan F.	Pengungkapan Penting Lainnya	36
Catatan F.1	Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	36
Catatan F.2	Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	36
Catatan F.3	Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	36
Catatan F.4	Rekening Pemerintah	37
Catatan F.5	Penyusutan Aset	37
Catatan F.6	Pengungkapan Lain-lain	37

pDAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BLU	: Badan Layanan Umum
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	: Bendahara Umum Negara
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
MA	: Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAK	: Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA	: Surat Kuasa Pengguna Anggaran
TA	: Tahun Anggaran
TAB	: Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	: Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TPA	: Tagihan Penjualan Angsuran
UP	: Uang Persediaan

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan KPU Kota Sawahlunto Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2015 TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar **Rp54.866.202** yaitu pengembalian belanja TA yang lalu dan pengembalian belanja tunjangan umum.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2015 adalah sebesar **Rp1.275.792.563** atau mencapai **80.42** persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp1.586.453.000**

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2015.

Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar **Rp450.260.599** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp139.200.640**; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar **Rp296.026.626**; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar **Rp0**. dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar **Rp15.033.333**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp450.260.599**

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsure pendapatan-LO, beban, surplus/deficit dari operasi, surplus/deficit dari kegiatan non operasional, surplus/deficit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode sampai dengan 31 Oktober 2015 adalah sebesar **Rp778.080**, sedangkan jumlah beban adalah sebesar **Rp1.597.209.994** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp (1.596.431.914)**. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar **Rp54.123.322** dan deficit sebesar **Rp55.883.322** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **Rp(1.540.548.592)**

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar **Rp574.645.817** dikurangi Defisit-LO sebesar **Rp (1.540.548.592)** kemudian ditambah dengan Penyesuaian Nilai Aset Tahun Berjalan **Rp1.270.305** dan ditambah Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar **Rp85.354.834** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai **Rp450.260.599**

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan Keuangan (CaK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan Operasional, dan laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, laporan Operasional, dan laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2015		% thd Anng	31 Des 2014
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1.				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	-	56.661.402	0,00	-
Jum Pendpt Negara & Hibah		-	56.661.402	0,00	-
B. Belanja Negara	B.2.				
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	1.015.801.000	764.572.712	75,27	347.947.704
2. Belanja Barang	B.2.2.	570.652.000	511.219.851	89,59	3.046.996.141
3. Belanja Modal	B.2.3.	-	-	0,00	-
4. Belanja Sosial	B.2.4.	-	-	0,00	-
Jumlah Belanja Negara		1.586.453.000	1.275.792.563	80,42	3.394.943.845



Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto

Jln. Khatib Sulaiman No. 54 Sawahlunto

Telp (0754) 61083 Fax. (0754) 61367

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2015 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sawahlunto, 31 Desember 2015

Sekretaris
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Maizon, SH
NIP 19590101 198403 1011

II. NERACA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(dalam Rp)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Oktober 2015	31 Desember 2014
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	0
Persediaan	C.1.2	156.067.128	156.067.128
Persediaan yang belum diregister		0	
Jumlah Aset Lancar		156.067.128	156.067.128
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2.2	1.002.868.550	957.097.275
Gedung dan Bangunan	C.2.3	151.305.400	151.305.400
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	0	0
Akumulasi Penyusutan	C.2.7	(858.147.324)	(710.565.844)
Jumlah Aset Tetap		296.026.626	397.836.831
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.2.8	93.871.800	141.033.075
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	C.2.9	(78.838.467)	(120.291.217)
Jumlah Aset Lainnya		15.033.333	20.741.858
JUMLAH ASET		467.127.087	574.645.817
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.3.1	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.3.2	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		0	0
EKUITAS			
Jumlah Ekuitas	C.4.1	467.127.085	574.645.817
JUMLAH EKUITAS DANA		467.127.085	574.645.817

III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	31 Des 2015	31 Des 2014
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	778.080	0
JUMLAH PENDAPATAN		778.080	0
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	764.572.712	0
Beban Persediaan	D.3	73.617.652	0
Beban Jasa	D.4	330.558.934	0
Beban Pemeliharaan	D.5	42.249.430	0
Beban Perjalanan Dinas	D.6	93.252.531	
Beban Bantuan Sosial	D.6	48.986.322	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.6	107.518.732	
Beban Perjalanan Dinas	D.6	0	0
Jumlah Beban Operasional		1.460.756.313	0
JUMLAH BEBAN		1.461.534.393	0
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.459.978.233)	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.12	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Defisit Selisih Kurs			
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		55.883.322	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		0	0
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.13	0	0
Bebas Perjalanan Dinas		0	0
Bebasn Persediaan		0	
SURPLUS/DEFISIT LO		(1.404.094.911)	0

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2015	31 Desember 2014
EKUITAS AWAL	E.1	574.645.817	0
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1.404.094.911)	0
PENYESUAIAN NILAI ASET/KEWAJIBAN		(1.327.840)	
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
LAIN-LAIN			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	0	0
KOREKSI ASET TETAP	E.4	-	0
KOREKSI ATAS BEBAN	E.5	0	0
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.6	0	0
KOREKSI LAIN-LAIN		0	0
Jumlah Lain-Lain		-	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.7	1.297.904.019	0
EKUITAS AKHIR		467.127.085	0

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 PenambahandanPerubahanAkunPendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan PMK 2005/PMK.011/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman No. 54 Santur, Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Komisi Pemilihan Umum

Kota Sawahlunto berkomitmen dengan visi “ *Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia* “.

Untuk mewujudkan visi tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Membangun lembaga penyelenggara pemilihan Umum yang memiliki Kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum.
- Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif.
- Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokrasi.

Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Basis

Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis

kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

A.4 Dasar Pengukuran

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengukur dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah

Kebijakan

A.5 Kebijakan Akuntansi

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

Pendapatan-

(1) Pendapatan-LRA

LRA

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan *atau* Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut:
- Pendapatan Non Kegiatan Operasional Lainnya
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban ; terjadinya konsumsi aset ; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

*Aset***(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar***a. Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap***Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksan Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

AsetLainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya

termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

*Penyusutan
Aset Tetap*

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan MasaManfaatAsetTetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama. Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah
Rp56.661.402.

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan yang berakhir 31 Desember 2015 adalah sebesar **Rp56.661.402** atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp0**. Pendapatan KPU Kota Sawahlunto terdiri dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2015		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	56.661.402	0,00
2. Pendapatan Jasa	0	0	0,00
3. Pendapatan Iuran dan Denda	0	0	0,00
3. Pendapatan Lain-lain	0	0	0,00
Jumlah	0	56.661.402	0,00

Realisasi Pendapatan Periode 31 Desember 2015 dan TA 2014 didapat dari Penyetoran Belanja Tahun 2014 dan Penyetoran kembali belanja tunjangan umum yang disebabkan karena salah satu pegawai diangkat menjadi pejabat struktural.

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu

Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2015 dan Semester 1 TA 2014

URAIAN	REALISASI Per 31 Oktober 2015	REALISASI PER 31 DESEMBER 2014	NAIK (TURUN) %
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	56.661.402	174	-
2. Pendapatan Jasa	-	-	-
3. Pendapatan Iuran dan Denda	-	-	-
3. Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah Pendapatan	56.661.402	174	-

B.2. Belanja

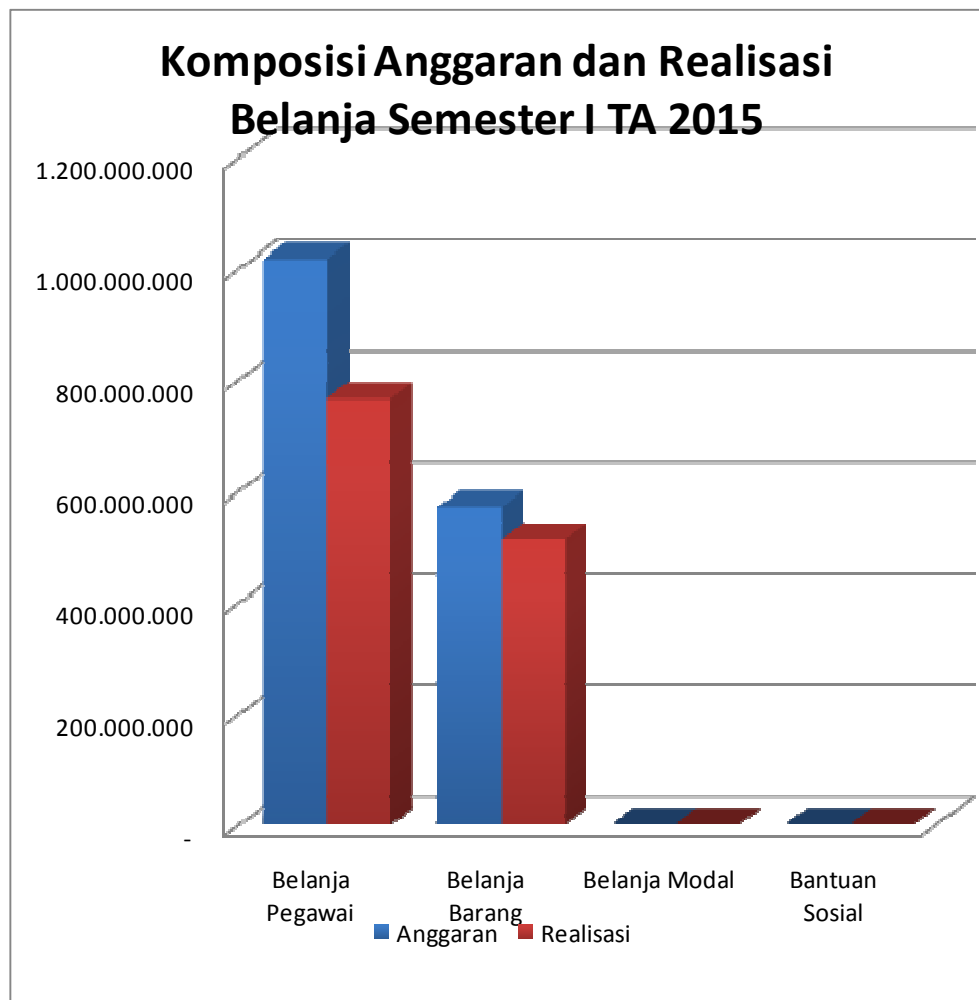
Realisasi Belanja
Negara
Rp1.275.792.563

Realisasi belanja instansi pada Per 31 Desember 2015 adalah sebesar **Rp1.275.792.563** atau **80.42** persen dari anggaran belanja sebesar **Rp1.586.453.000**. Rincian Anggaran dan realisasi belanja Per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2015

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	1.015.801.000	764.572.712	75,27
Belanja Barang	570.652.000	511.219.851	89,59
Belanja Modal	0	0	0
Bantuan Sosial	0	0	0
Total Belanja Kotor	1.586.453.000	1.275.792.563	80,42
Pengembalian Belanja		-	0
Belanja Netto	1.586.453.000	1.275.792.563	80,42

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan Per 31 Desember 2014 Realisasi Belanja Per 31 Desember 2015 mengalami sedikit penurunan sebesar **37.58** persen dibandingkan realisasi belanja periode sebelumnya.

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pada tahun 2014 anggaran belanja barang jauh diatas tahun 2015 karena pada tahun 2014 dilaksanakan Pemilu Legislatif dan Presiden yang

menyebabkan anggaran yang diterima khususnya belanja barang juga besar, pada tahun 2015 anggaran belanja barang hanyalah belanja kegiatan rutin.

Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2015 dan Semester 2 TA 2014

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER 2015	REALISASI SEM II TA. 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	764.572.712	347.947.704	119,74
Belanja Barang	511.219.851	3.046.996.141	(83,22)
Belanja Modal	0	-	-
Belanja Bantuan Sosial	0	-	-
Jumlah Belanja	1.275.792.563	3.394.943.845	(62,42)

*Belanja Pegawai
Rp764.572.712*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember TA 2015 dan Semester 2 TA 2014 adalah masing-masing sebesar **Rp764.572.712** dan **Rp764.167.340**.

Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 Des T.A. 2015	REALISASI SEM 2 T.A. 2014	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	764.572.712	764.167.340	0,05
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	764.572.712	764.167.340	3,80
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja Bersih	764.572.712	764.167.340	0,05

*Belanja Barang
Rp511.219.851*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Semester per 31 Desember 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar **Rp511.219.851** dan **Rp5.143.329.867**.

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar **37.58** persen dari Realisasi Belanja Barang Semester 2 TA 2014

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember TA 2015 dan TA 2014

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DES 2015	REALISASI T.A 2014	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	208.620.553	1.020.500.000	(79,56)
Belanja Barang Non Operasional	46.051.200	2.865.952.581	(98,39)
Belanja Jasa	51.675.608	606.619.500	(91,48)
Belanja Pemeliharaan	86.941.709	52.491.710	65,63
Belanja Barang Persediaan	24.678.250	439.377.756	100,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	93.252.531	158.388.320	-
Jumlah Belanja Kotor	511.219.851	5.143.329.867	(90,06)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja Bersih	511.219.851	5.143.329.867	(90,06)

Belanja Modal
Tanah Rp0

B.5 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Semester 31 Desember TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Realisasi Belanja Modal Tanah Semester 31 Desember TA 2015 sama nol persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Tanah Semester 2 TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain: Tidak Pagu Anggaran Belanja Modal Tanah

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember TA 2015 dan TA 2014

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DES T.A. 2015	REALISASI SEM 2 T.A. 2014	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belana Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0,00

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin Rp0

B.6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember TA 2015 dan TA 2014 adalah masing - masing sebesar **Rp0** dan **Rp16.725.000**

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember TA 2015 dan TA 2014

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DES 2015	REALISASI 31 DES. 2014	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	16.725.000	56.86
Jumlah Belanja Kotor	0	16.725.000	56.86
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0

B.7 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember TA 2015 dan 31 Desember TA 2014 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember TA 2015 dan TA 2014

--	--	--	--

Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan Rp0

B.8 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember TA 2015 sama sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester 2 TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Tidak Terdapatnya anggaran belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2015

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember TA 2015 dan TA 2014

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember T.A. 2015	REALISASI 31 Desember 2014	Naik (Turun) %
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00

Belanja Sosial
Rp0

B.9 Belanja bantuan sosial

Jumlah realisasi belanja sosial 31 Desember TA 2015 DAN TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0** yang merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
BRI Unit Sawahlunto	-	-
Uang Tunai	-	-
	-	-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak .

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
BRI Unit Sawahlunto	-	-
Uang Tunai	-	-
	-	-

C.3 Persediaan

Persediaan
Rp156.067.1
28

Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar **Rp156.067.128** dan **Rp156.067.128**.

Persediaan merupakan jenis asset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

Rincian Persediaan

No	Persediaan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
1	Kotak Suara 2004	73.078.500	73.078.500
2	Bilik Suara 2004	23.617.228	23.617.228
3	Kotak Suara 2009	37.679.400	37.679.400
5	Bilik Suara 2009	21.692.000	21.692.000
Jumlah		156.067.128	156.067.128

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik

Tanah
Rp0

C.4 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki KPU Kota Sawahlunto per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar **Rp0**. atau tidak ada aset KPU Kota Sawahlunto berupa Tanah karena baik tanah maupun gedung bangunan Kantor KPU masih merupakan milik/aset Pemerintah Kota Sawahlunto yang dipinjam pakai kepada KPU Kota Sawahlunto.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 01 Januari 2015	Rp	-
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Mutasi kurang:		
Transfer keluar	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2015	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2015	Rp	-

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Rincian Tanah

No.	Luas (m2)	Lokasi	Nilai	% Naik / (Turun)
1	-	-	0	
2	-	-	0	
Jumlah			0	-

Peralatan
dan Mesin
Rp1.002.868.
550

C.5 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah **Rp1.002.868.550** dan **Rp957.097.275**

Mutasi Nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Saldo per 01 Januari 2015	Rp	957.097.275
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Mutasi kurang:		
Transfer keluar	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2015	Rp	1.002.868.550
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2015	Rp	1.002.868.550

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin sebagai berikut :

a. Transaksi Penambahan dari pembelian :

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
Jumlah		-

Rincian set tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan
Bangunan
Rp151.305.40
0

C.6 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah **Rp151.305.400** dan **Rp151.305.400**.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2015	151.305.400
Mutasi tambah:	
Pengembangan nilai aset	-
Pengembangan melalui KDP	-
Mutasi kurang:	
-	
Saldo per 31 Desember 2015	151.305.400
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Desember 2015	-
Nilai Buku per 31 Desember 2015	151.305.400

Transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Transaksi Penambahan dari Pengembangan Saldo aset

1		-
2		-
	Jumlah	-

b. Transaksi Penambahan dari Pengembangan Melalui KDP

1		
2		
	Jumlah	-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp0*

C.7 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Tidak ada mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan.

*Aset Tetap
Lainnya Rp0*

C.8 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah **Rp0** dan **Rp0** merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai buku Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar **Rp0**, sedangkan nilai akumulasi penyusutannya adalah sebesar **Rp0**.

Mutasi Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2015	Rp0,00
Mutasi tambah:	
- pembelian	Rp0,00
- penyelesaian pembangunan	Rp0,00
- koreksi pencatatan nilai	
Mutasi kurang:	Rp0,00
- koreksi pencatatan nilai	Rp0,00
Saldo per 31 Desember 2015	Rp0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	Rp0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2015	Rp0,00

Mutasi Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan dalam Lampiran A1.

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0

C.9Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo Konstruksi dalam pengerjaan mencakup Saldo asset tetap yang masih dalam proses pembangunan, yang sampai dengan tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya

Mutasi transaksi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2015	-
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
Pengembangan KDP	-
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	-
Saldo per 31 Desember 2015	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	
Nilai Buku per 31 Desember 2015	-

Transaksi penambahan dan pengurangan konstruksi dalam pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut: Rincian asset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp(858.147.324)
4)

C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing **Rp (858.147.324)** dan **Rp(710.565.844)**.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian Saldo sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). .

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	Rp -	Rp -	Rp -
2	Peralatan dan Mesin	Rp 1.002.868.550	Rp 824.860.136	Rp 178.008.414
3	Gedung dan Bangunan	Rp 151.305.400	Rp 33.287.188	Rp 118.018.212
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp -	Rp 17.261.436	Rp (17.261.436)
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp -		Rp -
6	Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
Akumulasi Penyusutan		Rp 1.154.173.950	Rp 875.408.760	Rp 278.765.190

Terdapat perbedaan nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada SAIBA dan Simak BMN sebesar Rp. 2,- dimana nilai akumulasi penyusutan pada aplikasi Simak BMN lebih besar daripada nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada SAIBA, hal ini dikarenakan pada waktu melakukan penyusutan reguler dari Semester 2 Tahun 2014 ke Semester 1 tahun 2015 pada Aplikasi Simak BMN terdapat selisih Rp. 2,- .

Aset Tak
Berwujud
Rp0

C.11 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Lain-
Lain Rp
93.871.800

C.12 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing **Rp93.871.800** dan **Rp141.033.075**.

Aset lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam

kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut

Saldo per 01 Januari 2015	Rp	141.033.075
Mutasi tambah:	Rp	-
Pembelian	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Transfer keluar	Rp	(47.161.275)
Saldo per 31 Desember 2015	Rp	93.871.800
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	Rp	(78.838.467)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	Rp	15.033.333

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut :
rincian aset lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini

AkumulasiPe
nyusutandan
Amortisasi
Aset Lainnya
Rp
-78.838.467

C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing **Rp (78.838.467)** dan **Rp(120.291.217)**. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	Rp -	Rp -	Rp -
2	Aset Lain-lain	Rp 93.871.800	Rp (78.838.467)	Rp 15.033.333
	Akumulasi Penyusutan	Rp 93.871.800	Rp (78.838.467)	Rp 15.033.333

Terdapat perbedaan nilai akumulasi penyusutan aset tetap lainnya pada SAIBA dan Simak BMN sebesar Rp. 4,- dimana nilai akumulasi penyusutan pada aplikasi Simak BMN lebih kecil daripada nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada SAIBA, hal ini dikarenakan pada waktu melakukan penyusutan reguler dari Semester 2 Tahun 2014 ke Semester 1 tahun 2015 pada Aplikasi Simak BMN terdapat selisih Rp. 4,- .

Uang muka
dari KPPN
Rp
0

C.14 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0** Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan

(UP) atau Tambahan Uang Muka (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok Aset Lancar

*Pendapatan
Yang
Ditangguhkan
Rp0*

C.15 Pendapatan Yang Ditangguhkan

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0** merupakan Pendapatan Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBPN, penembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2015.

*Pendapatan
Diterima
Dimuka Rp0*

C.16 Pendapatan Diterima Dimuka

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar **Rp0** dan **Rp0** merupakan pendapatan yang sudah masuk ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga.

*Utang
kepada Pihak
Ketiga Rp0*

C.17 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada KPU Kota Sawahlunto per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp -	-
2	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	Rp -	-
3	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	Rp -	-
Total		-	-

*Kewajiban
Jangka
Pendek Rp0*

C.18 Dana yang harus disediakan untuk Kewajiban jangka pendek

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0** Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek yaitu utang kepada pihak ketiga **Rp0** dan Uang Muka dari KPPN **Rp0**

*Barang/jasa
yang masih
harus
diserahkan
Rp0*

C.19 Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang harus diserahkan kepada pihak lain.

*Barang/jasa
yang masih
harus
diterima Rp0*

C.20 Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima

Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0** Perkiraan tersebut merupakan ekuitas berupa barang/jasa yang akan dari kepada pihak lain.

*Ekuitas Rp
450.260.599*

C.21 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar **Rp450.260.599** dan **Rp574.645.817** Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
PNBP
Rp778.080

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar **Rp778.080** dan **Rp0**. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

URAIAN	REALISASI 31 DES T.A. 2015	REALISASI SEMESTER 2 T.A. 2014	NAIK (TURUN) %
1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	-	0,00
2. Pendapatan Jasa	-	-	0,00
3. Pendapatan Iuran dan Denda	-	-	0,00
3. Pendapatan Lain-lain	778.080	-	0,00
Jumlah Pendapatan	778.080	-	100,00

Beban Pegawai
Rp764.572.712

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai 31 Desember 2015 dan Semester II TA 2014 adalah masing-masing sebesar **Rp764.572.712** dan **Rp0**. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal

Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014

URAIAN JENIS BEBAN	SEM 2 T.A. 2015	SEM 2 T.A. 2014	Naik (Turun) %
Beban Gaji/Tunjangan	764.572.712	0	100,00
Beban Tunjangan-Tunjangan	0	0	-
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	-
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah	764.572.712	0	100,00

Beban
Persediaan
Rp73.617.652

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar **Rp73.617.652** dan **Rp0**. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2015 dan TA 2014

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember 2015	SEM 1 T.A. 2014	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	73.617.652	0	100,00
Pita Cukai, Materai dan Legis	0	0	-
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	100,00
Jumlah	73.617.652	0	100,00

Beban Jasa
Rp330.558.934

D.4 Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa pada 31 Desember 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar **Rp330.558.934** dan **Rp0**. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk 31 Desember 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Jasa 31 Desember 2015 dan TA 2014

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2015	SEM 1 T.A. 2014	Naik (Turun) %
Beban Langganan Daya dan Jasa	330.558.934	0	100,00
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	-
Beban Jasa Konsultan	0	0	-
Beban Jasa Profesi	-	-	100,00
Jumlah	330.558.934	0	100,00

Beban Pemeliharaan
Rp42.249.430

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar **Rp42.249.430** dan **Rp0**. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Semester 2 Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2015 dan TA 2014

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2015	SEM 1 T.A. 2014	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42.249.430	0	-
Jumlah	42.249.430	0	100,00

Beban
Perjalanan
Dinas Rp93.252.
531

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar **Rp93.252.531** dan **Rp0**. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Semester 1 Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2015 dan TA 2014

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-15	SEM 2 T.A. 2014	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	63.579.400	0	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.640.000	0	100,00
Beban Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota	0	0	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	27.033.131		
Jumlah	93.252.531	0	100,00

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp107.518.732

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar **Rp107.518.732** dan **Rp0**. . Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester 2 Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2015 dan TA 2014

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 Desember 2015	SEM 2 T.A. 2014	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	102.043.290	0	100,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.026.108	0	100,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.449.334		-
Jumlah Penyusutan	107.518.732		100,00
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Amortisasi Aset Lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	107.518.732	0	100,00

Beban Lain-Lain
Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0** Beban Bantuan Sosial merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja Bantuan Sosial. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Semester 1 Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Lain-lain 31 Desember 2015 dan TA 2014

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-15	SEM 2 T.A. 2014	Naik (Turun) %
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan sosial dalam bentuk Uang	0	0	-
	0	0	-
	0	0	-
Jumlah	0	0	-

Surplus/Defisit
dari Kegiatan
Non
Operasional Rp
55.883.322

D.9 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut :

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2015 dan TA 2014

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-15	SEM 2 T.A. 2014	Naik (Turun) %
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	1.760.000		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	54.123.322	0	100,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	-
Penjualan Alat Kantor	0	0	-
Defisit Selisih Kurs	0	0	100,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	55.883.322	0	100,00

Pos Luar Biasa
Rp0

D.10 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa 31 Desember 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa 31 Desember 2015 dan TA 2014

URAIAN	31-Okt-15	SEM 2 T.A. 2014	Naik (Turun) %
Pendapatan PNPB	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	0	0	-
Beban Persediaan	0	0	
Jumlah	0	0	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Ekuitas Awal
Rp574.645.817

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar **Rp574.645.817** dan **Rp0**.

Defisit LO
Rp(1.404.094.911)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan TA 2014 adalah sebesar **Rp(1.404.094.911)** dan **Rp0**. Defisit LO merupakan selisih kurang antar surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk 31 Desember 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2015 dan TA 2014

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Jumlah	0

Koreksi Aset Tetap
Rp-1.327.840

E.4 Koreksi Aset Tetap

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk 31 Desember 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar **Rp1.327.840** dan **Rp0**. Nilai Koreksi nilai aset tetap tersebut adalah koreksi nilai gedung dan bangunan

Koreksi Atas Beban
Rp0

E.5 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk 31 Desember 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Rincian untuk 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Rincian Koreksi Atas Beban

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Beban Pegawai	0
Beban Jasa	0
	0
Jumlah	0

Koreksi Atas
Pendapatan Rp0

E.6 Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan 31 Desember 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Rincian untuk 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Rincian Koreksi Atas Pendapatan

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
0	0
Jumlah	0

Ekuitas Akhir
Rp467.127.085

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar **Rp467.127.085** dan **Rp0**

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Ada banyak aset yang dimiliki oleh KPU Kota Sawahlunto dalam kondisi rusak berat dan tidak adanya dana penghapusan. Aset yang rusak berat memerlukan penghapusan karena memenuhi gudang dan tidak bisa digunakan lagi tetapi prosedur/tata cara penghapusan yang sulit dan belum sepenuhnya dimengerti.

Dikarenakan banyak Aset yang rusak terutama yang menyangkut operasional terutama komputer/PC dan Laptop serta printer maka terkadang pada saat dibutuhkan seperti pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 KPU Kota Sawahlunto kekurangan sarana dan prasarana penunjang pekerjaan, untuk belanja modal pada tahun 2015 tidak ada dialokasikan.

F.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak ada Daftar temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

F.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Informasi belanja secara akrual untuk KPU Kota Sawahlunto per 31 Desember 2015 adalah untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga sebesar **Rp0**.

F.4 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional KPU Kota Sawahlunto adalah

N o	Nama Satker	Nomor Rekening	Nama Bank	Nama Rekening	NPWP
1.	KPU Kota Sawahlunto	5534-010000-97- 304	BRI Cabang Sijunjung Unit Sawahlunto	BPg 077 KPU Kota Sawahlunto	00.431.708.7.203.0 00

F.5 PENYUSUTAN NILAI ASET

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang Semester II Tahun Anggaran 2015 tanggal 11 Januari 2016 No:BAR-124/WKN.13/KNL.01/II/2015 pada KPU Kota Sawahlunto terdapat Akumulasi Penyusutan **Aset Tetap Rp858.147.324, Aset Lainnya Rp78.838.467 dan Aset Ekstrakomptabel Rp2.955.000**. Berita Acara Terlampir.

F.6 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sawahlunto selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 02/Kpts/KPU-Sesko-003.435115/2015 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Maizon, SH
Pejabat Pembuat Komitmen	: Hayatul Mardiah, SH
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Rusnel, SH
Bendahara	: Sumarni, S.Sos
Staf	: Puti Astri P, SE
Staf	: Wiska Novita

2. DIPA Tahun Anggaran 2015 Pada KPU Kota Sawahlunto untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 ada beberapa kali revisi antara lain ;
 - a. Revisi POK untuk kegiatan sebagai berikut
 - Kegiatan 3354.994 Layanan Perkantoran untuk pembayaran Gaji PNS yang mana terjadi pagu minus di beberapa akun belanja gaji dan tunjangan PNS untuk itu dilakukan pergeseran pagu yang diambilkan dari belanja gaji pokok PNS ke belanja tunjangan anak/istri/suami, tunjangan PPh dan tunjangan struktural.
 - Kegiatan 3360.994 Layanan Perkantoran terjadi pergeseran akun belanja pemeliharaan [eralatan dan mesin ke akun belanja keperluan perkantoran
 - b. Selain itu juga terdapat penambahan pagu dari KPU RI sebesar 46.338.000 untuk kegiatan pemutakhiran data pemilih (3357.010) pada bulan Oktober 2015.
 - c. Diakhir tahun terdapat beban yang harus dibayar pada tahun 2016 yaitu Belanja Langganan Air PDAM bulan Desember 2015 dan Pembuatan/Penyusunan Laporan Kegiatan Tahun Anggaran 2015.
 - d. Tahun 2015 dalam Neraca terdapat akun persediaan yang belum diregister sebesar (16.868.488) dan harus dilakukan jurnal penyesuaian ke KPPN Sijunjung.

LAMPIRAN A1
KPU KOTA SAWAHLUNTO
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2015

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A	Tanah		-	0	-
1	Tanah Parsil	50	-	0	-
B	Peralatan dan Mesin		1.005.293.550	827.285.136	178.008.414
	Alat Angkutan Darat Bermotor	5	419.793.000	318.395.000	101.398.000
	Alat Ukur	5	9.800.000	7.300.000	2.500.000
	Alat Pengolahan	5	7.068.000	7.068.000	0
	Peralatan Pemancar	5	18.925.000	4.445.000	14.480.000
	Peralatan Komunikasi Navigasi	5	1.175.000	391.669	783.331
	Alat Kedokteran	5	1.100.000	1.100.000	0
	Alat Khusus Kepolisian	5	2.672.175	1.670.110	1.002.065
	Alat Kerja Penerbangan	5	22.770.000	5.692.500	17.077.500
	Alat Kantor	5	94.566.500	83.818.250	10.748.250
	Alat Rumah Tangga	5	80.768.350	78.046.600	2.721.750
	Alat Studio	5	31.338.550	28.614.675	2.723.875
	Alat Komunikasi	5	3.450.000	3.450.000	0
	Unit Alat Laboratorium	8	28.209.000	19.823.750	8.385.250
	Komputer Unit	4	222.546.000	212.235.565	10.310.435
	Peralatan Komputer	4	61.111.975	55.234.017	5.877.958
C	Gedung dan Bangunan		151.305.400	33.287.188	118.018.212
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	151.305.400	33.287.188	118.018.212
D	Jalanan Jembatan		0	0	0
1	Jembatan	50	0	0	0
E	Irigasi		0	0	0
1	Bangunan Air Irigasi	50	0	0	0
2	Bangunan Air Bersih	40	0	0	0
F	Aset Tetap Lainnya		0	0	0
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	4	0	0	0
2	Kartografi, Naskah dan Tulisan	4	0	0	0
G	Aset Tetap yang Tidak Digunakan		94.401.800	79.368.467	15.033.333
1	Alat Studio	7	2.314.050	2.314.050	0
2	Alat Kantor	5	0	0	0
3	Alat Rumah Tangga	5	5.963.500	5.963.500	0
4	Alat Komunikasi	5	5.335.000	5.335.000	0
5	Unit Alat Laboratorium	8	22.250.000	7.416.668	14.833.332
6	Komputer Unit	4	44.554.000	44.554.000	0
7	Peralatan Pemancar	10	400.000	200.000	200.000
8	Peralatan Komunikasi Navigasi	3	0	-1	0
9	Peralatan Komputer	5	13.585.250	13.585.250	32.585.000
10	Kartografi, Naskah, Lukisan	4	0	0	0
11	Barang Bercorak Kesenian	4	0	0	0
H.	KDP		0	0	0
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			1.156.598.950	86.057.324	296.026.626
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya			1.251.000.750	165.425.791	311.059.959

LampiranA2

**KPU KOTA SAWAHLUNTO
INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJASECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015**

BA : 01
 Eselon 1 : 01
 UAPPA W : 0854
 Satuan Kerja : 656223 Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto

Akun	Uraian	Kas	Tambah	Kurang	Informasi	Dokumen
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.760.000	0	0	0	
423227	Pendapatan Bea Lelang	35.200	0	0	0	
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	54.123.322	0	0	0	
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	742.880	0	0	0	
511111	Beban Gaji Pokok PNS	232.883.500	0	0	0	
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	7.223	0	0	0	
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	15.770.860	0	0	0	
511122	Beban Tunj. Anak PNS	5.196.648	0	0	0	
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	44.460.000	0	0	0	
511125	Beban Tunj. PPh PNS	5.873.141	0	0	0	
511126	Beban Tunj. Beras PNS	17.289.340	0	0	0	
511129	Beban Uang Makan PNS	85.402.000	0	0	0	
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	9.690.000	0	0	0	
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	348.000.000	0	0	0	
521111	Beban Keperluan Perkantoran	128595083	0	0	0	
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	330.470	0	0	0	
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	71.640.000	0	0	0	
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	8.055.000	0	0	0	
521211	Beban Bahan	2.051.200	0	0	0	

521213	Beban Honor Output Kegiatan	44.000.000	0	0	0
521811		24.678.250	0	0	0
522111	Beban Langganan Listrik	40.479.608	0	0	0
522141	Beban Sewa	1.196.000	0	0	0
522191	Beban Jasa Lainnya	10.000.000	0	0	0
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.745.400	0	0	0
523112		14.707.330	0	0	0
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.066.800	0	0	0
523123		61.422.179	0	0	0
524111	Beban Perjalanan Biasa	63.579.400	0	0	0
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.640.000	0	0	0
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	27.033.131	0	0	0

Sawahlunto, 31 Desember 2015

Kuasa Pengguna Anggaran



MAIZON, SH

NIP. 195901011984031011